

**RENCANA KERJA  
(RENJA)**



**KECAMATAN HALONG  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2024**



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## KECAMATAN HALONG

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 105 71666 Email : Kechalong1@gmail.com  
IG : Kantorkecamatanhalong FB : Kantor Kecamatan Halong

---

### KEPUTUSAN CAMAT HALONG NOMOR 83 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN HALONG TAHUN 2024

#### CAMAT HALONG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Halong tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT HALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN HALONG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 mempunyai tugas Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Halong

Pada tanggal : 12 Desember 2022

**CAMAT HALONG**

**RUSMIN NURIADIN, S.Ag., S.Sos., MH**  
**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19680321 199101 1 001**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN HALONG TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
01	Rusmin Nuriadin, S.Ag., S.Sos., MH NIP. 19680321 199101 1 001	Camat	Penanggung Jawab
02	Kastina, S.Ag., MA NIP. 19730827 200701 2 007	Sekretaris Kecamatan	Ketua
03	Heri Suharmani NIP. 19711027 199503 1 004	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Sekretaris
04	Muhammad, S.Pd.I NIP. 19720713 200701 1 015	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
05	Mili Yusmawati, S.Sos. NIP. 19801117 200604 2 024	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
06	Rukmini, S.Pd., MM NIP. 19690725 200701 2 019	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
07	Taufikurrahman, S.Sos. NIP. 19851008 201001 1 014	Kasi Pemerintahan Umum & Koordinasi Trantib	Anggota
08	Muhammad Subeli NIP. 19650607 198602 1 008	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Anggota
09	Hardiansyah, S.Pd. NIP. 19750507 200904 1 002	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota



**CAMAT HALONG**

**RUSMIN NURIADIN, S.Ag., S.Sos., MH**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19680321 199101 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Serta diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Halong, 03 April 2023



**RAHMADI, S.Sos., M.AP**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP. 19810914 201001 1 009**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	18
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	30
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	30
3.3 Program dan Kegiatan .....	31



	3.4 Analisis Dampak Sosial Ekonomi .....	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	41
BAB V	PENUTUP .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan untuk 1 (satu) tahun, yang merupakan acuan SKPD dalam menyelenggarakan Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 didasarkan kepada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Halong Tahun 2021-2026, dengan tetap memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024. Tahun 2024 adalah Tahun Keempat Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Halong Tahun 2021-2026.

Untuk Tahun 2024 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,

dimana untuk Tahun 2021 s/d Tahun 2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD yaitu yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** Indikatornya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan **“Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan”** dengan Indikatornya Skor Indeks Desa Membangun (IDM). Tahun 2024 Kecamatan Halong hanya melaksanakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD yang ingin dicapai yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik”** dengan Indikatornya yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ada perbedaan dalam merumuskan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun-tahun sebelumnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Nilai Rata-Rata Hasil Survey yang dilakukan Seksi Pelayanan Publik terhadap 50 (lima puluh) orang responden pada Semester I dan Semester II. Sedangkan untuk Tahun 2024 pelaksanaan survey tidak terbatas pada Seksi Pelayanan Publik saja, melainkan melibatkan seluruh seksi yang ada pada Kecamatan Halong. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan tidak dilaksanakan lagi untuk Tahun 2024, hal ini disebabkan oleh sangat kecilnya peran Kecamatan Halong dalam Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM). Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD ini diakibatkan oleh berubahnya Penjenjangan Kinerja atau Cascading Kecamatan Halong. Perubahan Cascading ini juga mengakibatkan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Camat, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional/Analisis atau Pelaksana. Pada tahun-tahun sebelumnya, Perjanjian Kinerja (PK) Camat adalah Sasaran SKPD, Kepala Seksi adalah Program/Kegiatan dan

Jabatan Fungsional/Analisis atau Pelaksana adalah Sub Kegiatan. Sedangkan untuk Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Camat adalah Sasaran SKPD/Program/Kegiatan, Kepala Seksi adalah Sub Kegiatan dan Jabatan Fungsional/Analisis atau Pelaksana adalah Aktivitas dari Sub Kegiatan. Perlu disampaikan juga, bahwa Tahun 2024 akan terjadi perubahan SOTK dan Nomenklatur pada Pemerintah Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD ini adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”***.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Halong Tahun 2021-2026.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Kecamatan Halong dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sehingga Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat tercapai.
3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Halong pada Tahun 2024.
4. Sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**b. Tujuan**

1. Menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada setiap Tahun Anggaran.
3. Untuk menjamin terciptanya Sinkronisasi dan Sinergi antara Kasi-kasi dan Sekretariat pada Kecamatan Halong.
4. Sebagai bahan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Analisis Dampak Sosial Ekonomi

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dengan dilakukannya evaluasi, maka dapat diketahui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mana saja yang pencapaian targetnya sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sehingga nantinya diharapkan Kualitas Kinerja Instansi Pemerintah bisa ditingkatkan, dan berdampak terhadap Rencana Strategis Kecamatan Halong Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Halong melaksanakan sebanyak 6 Program, 12 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Dengan Capaian Kinerja (seluruh Sub Kegiatan) sebesar 98,17% dan Realisasi Anggaran sebesar 92,85%. Untuk Rinciannya dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kecamatan Halong**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong</b>	<b>75.4 Nilai</b>	<b>69.21 Nilai</b>	<b>65.2 Nilai</b>	<b>71,63 Nilai</b>	<b>71,63 Nilai</b>	<b>68,20 Nilai</b>	<b>68,20 Nilai</b>	<b>90%</b>
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan baik	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	36 Bulan	50%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 OP	3 OP	6 OP	5 OP	5 OP	-	8 OP	23%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi Umum	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	463 Kali	334 Kali	87 Kali	87 Kali	87 Kali	90 Kali	511 Kali	110%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	-	18 Bulan	25%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	25%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	16 Buah	12 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	-	16 Buah	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	60 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	24 Bulan	40%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga	-	-	-	-	35 Keluarga	35 Keluarga	100%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	60 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	50%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	32 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	13 Kegiatan	40%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Halong dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Halong, yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Halong Tahun 2016-2021.

Di bawah ini disajikan Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan dengan Format Tabel T-C.30, sebagai berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Kecamatan Halong**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	80	82	83	84	85	86	84,76	86,24	86,24	-	Untuk Tahun 2024 dikarenakan ada Perubahan Nomenklatur dan SOTK maka untuk Proyeksi IKM belum bisa ditetapkan dikarenakan ada perbedaan Cara Perhitungan

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Halong menetapkan Sasaran Kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran. Pencapaian indikator Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini.

### **Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	86,24	105,17%
Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor (Indeks Desa Membangun)	0,6843	0,7378	107,82%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut, diperoleh dari Nilai Rata-Rata Hasil Survey yang dilakukan Seksi Pelayanan Publik terhadap 50 (lima puluh) orang responden pada Semester I dan Semester II. Sedangkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) diperoleh dari Penilaian terhadap Data Isian Kuisisioner yang diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada seluruh desa dalam Wilayah Kecamatan Halong untuk 1 (satu) tahun.

Formula yang dipergunakan dalam melakukan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut :



### **Formula Perhitungan**

Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan Per Semester

Sedangkan untuk Skor Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

### **Formula Perhitungan**

Total Skor IDM Seluruh Desa

Jumlah Desa

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri adalah merupakan bentuk penjabaran terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat adalah :

- a. Bidang Perizinan, meliputi :
  1. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  2. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
  3. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO)
  4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  5. Rekomendasi Izin Keramaian
  6. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Bidang Non Perizinan, meliputi :
  1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  3. Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa/Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan

4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten
9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
11. Fasilitasi Surat Kematian.

Adapun jumlah kegiatan baik itu Bidang Perizinan maupun Bidang Non Perizinan yang dilaksanakan pada Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Bidang Perizinan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	-	
2.	Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan	-	
3.	Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);	-	
4.	Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	-	
5.	Rekomendasi Izin Keramaian;	32	
6.	Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah	Keterangan
1.	Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);	104	
2.	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);	-	
3.	Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa /Kelompok/ Organisasi Kemasyarakatan;	121	
4.	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;	7	
5.	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;	18	
6.	Legalisasi Surat Domisili Penduduk;	1	
7.	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);	18	
8.	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;	-	Dilaksanakan oleh Pemdes
9.	Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,	-	Dilaksanakan oleh Pemdes
10.	Surat Keterangan Dispensasi Nikah;	12	
11.	Fasilitasi Surat Kematian.	160	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I (PENDAHULUAN) tepatnya di Latar Belakang Alinea Ketiga, bahwa untuk Tahun 2024 Kecamatan Halong melaksanakan

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD yaitu **“Terwujudnya Tata Pemerintahan Kecamatan yang Baik”** dengan Indikatornya yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Tahun 2024 diperoleh dari survey yang dilakukan oleh seluruh seksi pada Kecamatan Halong. Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik hanya bisa terwujud ketika seluruh seksi menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya tersebut maka untuk Tahun 2024 akan terjadi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Program.

Adapun isu-isu penting dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kecamatan Halong, yaitu :

- Masih lemahnya pemahaman akan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Tanggungjawab oleh sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Belum Optimalnya Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Jenjang Pendidikan yang Tinggi.
- Masih rendahnya Tingkat Kedisiplinan sebagian PNS, terutama dalam masalah Jam Kerja.
- Peningkatan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas.

Meskipun begitu, Kecamatan Halong tetap optimis akan dapat menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya, hal ini mengingat masih adanya tantangan dan peluang untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, untuk tantangan yaitu :

- Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dan transparan.

- Adanya tuntutan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Sedangkan yang menjadikan peluang untuk bisa lebih meningkatkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, adalah :

- Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang Jujur, Bersih, dan Berwibawa.
- Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
- Tersedianya Alokasi Anggaran yang cukup.
- Tersedianya Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari segi jumlah maupun tingkat pendidikan.
- Adanya pelatihan/penjenjangan karir.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Kecamatan Halong merencanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Akan tetapi setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan, Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perubahan termasuk Pagu Anggarannya. Dengan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil analisa dimaksud, diharapkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dapat dicapai. Hal ini tentunya akan berimbas kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk menyikapi hal ini, Kecamatan Halong akan terus melakukan koordinasi terutama dengan Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Sehingga nantinya apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Sikap Kecamatan Halong terhadap Rancangan

Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 di bawah ini :

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kecamatan Halong**

No	Rncangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) KECAMATAN HALONG</b>	<b>70,40</b>	<b>4.608.640.632</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) KECAMATAN HALONG</b>	<b>70,40</b>	<b>4.237.640.632</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Laporan	5.247.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Laporan	5.247.800	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.738.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.738.200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.771.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.771.400	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.738.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.738.200	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>3.568.500.552</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>3.568.500.552</b>	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Halong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	3.524.844.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Halong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	3.524.844.552	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	43.656.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	43.656.000	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>257.011.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>257.011.000</b>	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Halong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.659.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Halong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.659.000	

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	246.352.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	246.352.000	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Paket</b>	<b>371.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Paket</b>	-	
8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Halong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	140.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Halong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Direalisasikan pada Anggaran Perubahan 2023
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Halong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	231.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Halong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Direalisasikan pada Anggaran Perubahan 2023
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>238.601.180</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>238.601.180</b>	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.700.000	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192.901.180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192.901.180	
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>168.280.100</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>168.280.100</b>	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Halong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	106.860.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Halong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	106.860.600	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Halong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	61.419.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Halong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	61.419.500	
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>272.757.100</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>272.757.100</b>	
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>272.757.100</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>272.757.100</b>	



14	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	272.757.100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	272.757.100	
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>187.989.600</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>187.989.600</b>	
8	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>49.766.400</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>49.766.400</b>	
15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	49.766.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	49.766.400	
9	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>138.223.200</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>138.223.200</b>	
16	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Halong dan Kabupaten Balangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35 Keluarga	138.223.200	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Halong dan Kabupaten Balangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35 Keluarga	138.223.200	
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>JUMLAH LAPORAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>62.323.200</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>JUMLAH LAPORAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>62.323.200</b>	
10	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>62.323.200</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>62.323.200</b>	
17	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	62.323.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	62.323.200	
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>181.735.500</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>181.735.500</b>	
11	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>181.735.500</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>181.735.500</b>	

18	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Halong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	39.096.400	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Halong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	39.096.400	
19	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	142.639.100	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	142.639.100	
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>664.638.200</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>664.888.200</b>	
12	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>664.638.200</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>664.888.200</b>	
20	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	42.023.200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	42.273.200	
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Halong dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	258.732.800	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Halong dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	258.732.800	
22	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	32.166.400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	32.166.400	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	35.223.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	35.223.200	
24	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	22.113.200	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	22.113.200	
25	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	70.823.200	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	70.823.200	

26	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	55.061.400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	55.061.400	
27	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	38.296.400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	38.296.400	
28	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	110.198.400	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Halong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	110.198.400	
<b>Jumlah</b>					<b>5.978.084.232</b>						<b>5.607.334.232</b>

Setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan, maka ada beberapa Sub Kegiatan pada Rancangan Awal yang dihilangkan atau di-NOL-kan Pagu Anggaranannya. Untuk lebih jelasnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dihilangkan dari Rancangan Awal, hal ini berdasarkan saran dari Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Dimana Sub Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), juga dihilangkan atas saran dari Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Dimana Sub Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi-Asosiasi maupun SKPD lain yang terkait langsung dengan Program Kegiatan Masyarakat diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Halong Tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Usulan tersebut untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang terkait. Usulan yang dimasukkan ke dalam Tabel T-C.32 adalah Usulan Prioritas, dari keseluruhan usulan yang berjumlah 226 usulan. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.32 :

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kecamatan Halong**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
01	Pembangunan Gadung PKK/Posyandu	Desa Buntu Pilanduk RT.01		6 M x 10 M	
02	Pembangunan Kantor Desa	Desa Hauwai RT.03		8 M X 12 M	
03	Peningkatan Jalan Poros Desa	Desa Sumber Agung RT.04		P 1.000 M X L 6 M	
04	Pengaspalan Jalan	Desa Karya RT.01, RT.02 dan RT.03		3 KM	
05	Peningkatan Jalan Poros Betonisasi	Dsa Kapul RT.04		Panjang 5,5 KM Lebar 4 M	
06	Pembangunan Bronjong Sungai Balangan	Desa Padang Raya RT.01		± P = 50 M	
07	Pembukaan Badan Jalan Mamigang-Marajai	Desa Mamigang RT.06		8 KM	
08	Peningkatan Jalan Depan Puskesmas kecamatan halong (Diperlukan Pengaspalan)	Desa Halong RT.05		150 M	
09	Pembangunan WC Umum	Desa Uren RT.04		2 Unit	
10	Jembatan Sungai Puyun Penghubung RT.01 dan 02	Desa Puyun RT.01		P = 12 M x L = 4 M	
11	Pengadaan Mesin Pengering Jagung	Desa Gunung Riut RT.01		1 Unit	
12	Rehabilitasi Gedung Kantor Desa; Atap dan Plapon Bocor, Ruang sempit	Desa Binjai Punggal RT.07		1 Paket	
13	Peningkatan Jalan Lingkungan	Desa Mauya RT.01, RT.02 dan RT.03		400 M	
14	Rehabilitasi Drainase RT.02	Desa Baruh Panyambaran RT.01		1 Paket	
15	Normalisasi Danau/Air Bersih	Desa Suryatama RT.03		Luas 5 Hektar	
16	Pembangunan Ruang Belajar TPA	Desa Binju RT.02		6 M x 8 M	
17	Pembangunan Rumah Bidan Desa	Desa Aniungan RT.01		1 Paket	
18	Pengaspalan Jalan Poros	Desa Mamantang RT.01		5 KM	
19	Rehabilitasi Jalan Poros	Desa Mantuyan RT.03 ke RT.05		3 KM	
20	Pembangunan Jembatan Gantung	Desa Tabuan RT.04		70 M	

21	Pembangunan Jembatan Gantung	Desa Binung Santang RT.02		80 M	
22	Pengerasan Jalan dan Pembangunan Jembatan	Desa Liyu RT.04		1,2 KM dan 1 Buah Jembatan	
23	Rehabilitasi Total Jembatan Gantung	Desa Bangkal RT.02		70 M	
24	Pembangunan Jalan Poros Mauya-Marajai	Desa Marajai RT.01		2 KM	
25	Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan Halong	Kantor Kecamatan Halong		10 M	
26	Peningkatan Pasar Halong	Desa Halong		1 Paket	
27	Peningkatan Jalan Bangkal-Padang Raya	Desa Bangkal ke Desa Padang Raya		-	
28	Peningkatan Jalan Halong-Gunung Riut	Desa Halong ke Desa Gunung Riut		-	
29	Pembangunan Tugu Simpang 4 Muara Halong	Desa Halong		-	
30	Pembangunan Pagar dan Pemasangan Paving Block Puskesmas	Puskesmas Uren		1 Buah	
31	Rehabilitasi Puskesmas dan Rumah Dinas	Puskesmas Uren		1 Buah	
32	Rehabilitasi Poskesdes Mantuyan dan Penyediaan Air Bersih	Desa Mantuyan		1 Buah	
33	Rehabilitasi Poskesdes Mamantang	Desa Mamantang		1 Buah	
34	Rehabilitasi Poskesdes Mauya	Desa Mauya		1 Buah	
35	Rehabilitasi Poskesdes Binuang Santang	Desa Binuang Santang		1 Buah	
36	Rehabilitasi Poskesdes Uren	Desa Uren		1 Buah	
37	Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Bidang Kesehatan	Wilayah Kerja Puskesmas Uren		7 Desa	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional adalah bersifat makro, baik dalam hal pembangunan maupun perekonomian. Kecamatan Halong dalam menentukan Prioritas program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih mengutamakan perbaikan kelembagaan sebagai modal awal mendukung lancarnya Fungsi Pelayanan.

##### **3.2 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat daerah**

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik”***, dengan Sasaran SKPD, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa ada perubahan yang cukup signifikan terhadap Tujuan dan Sasaran SKPD, dimana hal tersebut berdampak pula terhadap perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Tahun 2024 diharapkan Kepala Seksi mempunyai Indikator Kinerja yang betul-betul menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk perhitungan Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini :

### Tujuan, Sasaran dan Indikator

<b>Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>CAPAIAN TAHUN 2022</b>	<b>TARGET AKHIR 2024</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai IKM	86,24	84
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa			

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Halong untuk Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Program, 11 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.607.334.232,-

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi Prioritas Kecamatan Halong di Tahun 2024 yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yang ingin dicapai, adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Sedangkan Program pendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk keterangan lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kecamatan Halong**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) KECAMATAN HALONG</b>		<b>70,40</b>	<b>4.237.640.632</b>			<b>70,40%</b>	<b>4.603.264.487</b>
7	01	01	2	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>4 Dokumen 2 Laporan</b>	<b>5.247.800</b>			<b>4 Dokumen 2 Laporan</b>	<b>5.247.800</b>
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Halong	2 Dokumen	1.738.200	APBD		2 Dokumen	1.738.200
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Halong	2 Dokumen	1.771.400	APBD		2 Dokumen	1.771.400
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Halong	2 Laporan	1.738.200	APBD		2 Laporan	1.738.200
7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>3.568.500.552</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>3.920.985.007</b>

7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Halong	23 Orang	3.524.844.552	APBD		23 Orang	3.877.329.007
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Halong	4 Dokumen	43.656.000	APBD		4 Dokumen	43.656.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>257.011.000</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>257.011.000</b>
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Halong	3 Paket	10.659.000	APBD		3 Paket	10.659.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Balangan	12 Laporan	246.352.000	APBD		12 Laporan	246.352.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>238.601.180</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>238.601.180</b>
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Halong	12 Laporan	45.700.000	APBD		12 Laporan	45.700.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Halong	12 Laporan	192.901.180	APBD		12 Laporan	192.901.180
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>168.280.100</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>181.419.500</b>
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Halong	12 Unit	106.860.600	APBD		13 Unit	120.000.000

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Halong	3 Unit	61.419.500	APBD		3 Unit	61.419.500
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>272.757.100</b>			<b>100%</b>	<b>272.757.100</b>
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1 Laporan	272.757.100			100%	272.757.100
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	9 Laporan	272.757.100	APBD		9 Laporan	272.757.100
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>187.989.600</b>			<b>100%</b>	<b>187.989.600</b>
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Laporan	49.766.400			100%	49.766.400
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	1 Laporan	49.766.400	APBD		1 Laporan	49.766.400
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		1 Laporan	138.223.200			100%	138.223.200

7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Halong dan Kabupaten Balangan	35 Keluarga	138.223.200	APBD		35 Keluarga	138.223.200
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>JUMLAH LAPORAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>62.323.200</b>			<b>100%</b>	<b>62.323.200</b>
7	01	04	2	01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>62.323.200</b>			<b>100%</b>	<b>62.323.200</b>
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	14 Laporan	62.323.200	APBD		14 Laporan	62.323.200
7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>181.735.500</b>			<b>100%</b>	<b>181.735.500</b>
7	01	05	2	01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>181.735.500</b>			<b>100%</b>	<b>181.735.500</b>

7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Halong	200 Orang	39.096.400	APBD		200 Orang	39.096.400
7	01	05	2	01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Halong	2 Dokumen	142.639.100	APBD		2 Dokumen	142.639.100
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>664.888.200</b>			<b>100%</b>	<b>554.689.800</b>
7	01	06	2	01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>9 Laporan</b>	<b>664.888.200</b>			<b>100%</b>	<b>554.689.800</b>
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Halong	3 Dokumen	42.273.200	APBD		3 Dokumen	42.273.200
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Halong dan Luar Daerah	12 Dokumen	258.732.800	APBD		12 Dokumen	258.732.800
7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Halong	4 Dokumen	32.166.400	APBD		4 Dokumen	32.166.400

7	01	06	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Halong	4 Dokumen	35.223.200	APBD		4 Dokumen	35.223.200
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Halong	1 Dokumen	22.113.200	APBD		1 Dokumen	22.113.200
7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Halong	3 Dokumen	70.823.200	APBD		3 Dokumen	70.823.200
7	01	06	2	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Halong	4 Dokumen	55.061.400	APBD		4 Dokumen	55.061.400
7	01	06	2	01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Halong	2 Dokumen	38.296.400	APBD		2 Dokumen	38.296.400
7	01	06	2	01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Halong	1 Dokumen	110.198.400	APBD		-	-
<b>Jumlah</b>										<b>5.607.334.232</b>				<b>5.862.759.687</b>

### 3.4 Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Dengan dilaksanakannya seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33 di atas, diharapkan akan berdampak secara Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Kecamatan Halong. Khususnya untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik”**, dengan Sasaran SKPD, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa.

Adapun Dampak Sosial Ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan oleh Masyarakat Kecamatan Halong terkait Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Secara Sosial, dengan semakin **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** dan **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa**, maka Kehidupan Sosial Masyarakat Kecamatan Halong akan semakin kondusif dan berkualitas.
- b. Dengan semakin **Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat**, maka diharapkan hal tersebut akan berdampak terhadap Perekonomian



Masyarakat Halong, hal ini dikarenakan Pemerintah Kecamatan telah memfasilitasi agar mereka lebih meningkat dari sisi pemberdayaannya.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Halong pada Tahun 2024, adalah merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi. Pemilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan didasarkan atas Strategi dan Kebijakan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan Indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024. Pendanaan itu sendiri bersumber dari APBD Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pendanaan Indikatif terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.237.640.632</b>
	<b>KABUPATEN LIZOLA</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.247.800</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.738.200
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.771.400
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.738.200
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.568.500.552</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.524.844.552
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.656.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>257.011.000</b>
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.659.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.352.000
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.601.180</b>
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.700.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.901.180
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.280.100</b>
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.860.600
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.419.500
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>272.757.100</b>
<b>6</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>272.757.100</b>
12	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	272.757.100
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>187.989.600</b>
<b>7</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>49.766.400</b>
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.766.400
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>138.223.200</b>
14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	138.223.200

<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>62.323.200</b>
<b>9</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>62.323.200</b>
15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	62.323.200
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>181.735.500</b>
<b>10</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Desa</b>	<b>181.735.500</b>
16	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	39.096.400
17	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	142.639.100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>664.888.200</b>
<b>11</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>664.888.200</b>
18	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42.273.200
19	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	258.732.800
20	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.166.400
21	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	35.223.200
22	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	22.113.200
23	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.823.200
24	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	55.061.400
25	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	38.296.400
26	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	110.198.400
		<b>5.607.334.232</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 adalah pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Halong dalam melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu juga, merupakan pedoman dalam pencapaian Target Kinerja yang akan ditetapkan nantinya pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, baik pada Level Eselon III maupun Eselon IV, serta Target Kinerja pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Staf. Selanjutnya hal tersebut diharapkan juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Balangan Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan tetap menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi pada tahun yang akan datang.

Halong, 03 April 2023



**CAMAT HALONG**



**RAHMADI, S.Sos., M.AP**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP. 19810914 201001 1 009**